

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(STUDI KASUS PASAR PASIR GINTUNG)**

(Skripsi)

Oleh:

**M NAUFAL ALFARISI
NPM. 2116041069**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL
DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS PASAR PASIR
GINTUNG)**

Oleh

M NAUFAL ALFARISI

SKRIPSI

**Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS PASAR PASIR GINTUNG)

OLEH

M NAUFAL ALFARISI

Pasar tradisional memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, namun mengalami penurunan daya saing akibat kondisi fisik yang kurang memadai dan perkembangan pasar modern. Oleh karena itu, revitalisasi pasar menjadi kebijakan strategis untuk meningkatkan fungsi dan kenyamanan pasar tradisional. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Pasir Gintung di Kota Bandar Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan tujuan revitalisasi telah ditetapkan dengan jelas dan berhasil memperbaiki kondisi fisik pasar, namun belum optimal dalam penataan pedagang dan peningkatan aktivitas ekonomi pasca-revitalisasi. Sumber daya anggaran dan sarana prasarana tergolong memadai, tetapi sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pengawasan pasar masih terbatas. Organisasi pelaksana memiliki kewenangan yang jelas, namun sikap pelaksana masih kurang tegas dalam penertiban pedagang dan pengelolaan pasca-revitalisasi. Komunikasi dan koordinasi antarinstansi telah dilakukan, tetapi belum berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, meskipun dukungan politik pemerintah cukup kuat, kondisi sosial dan ekonomi pedagang belum sepenuhnya mendukung keberhasilan revitalisasi. Temuan ini menegaskan pentingnya perhatian terhadap aspek non-fisik dalam implementasi kebijakan revitalisasi pasar.

Kata Kunci: Revitalisasi, Implementasi Kebijakan, Pasar Tradisional

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF TRADITIONAL MARKET REVITALIZATION POLICY IN BANDAR LAMPUNG CITY (CASE STUDY OF PASIR GINTUNG MARKET)

BY

M NAUFAL ALFARISI

Traditional markets play an important role in the social and economic life of Indonesian society; however, they have experienced a decline in competitiveness due to inadequate physical conditions and the development of modern markets. Therefore, market revitalization has become a strategic policy to improve the function and comfort of traditional markets. This study aims to analyze the implementation of the Pasir Gintung Market revitalization policy in Bandar Lampung City. The research employs a descriptive qualitative approach using the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, which includes six variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, implementers' attitudes, inter-organizational communication, and social, economic, and political conditions. The findings show that the standards and objectives of revitalization have been clearly defined and have successfully improved the physical condition of the market; however, they have not been fully achieved in terms of trader arrangement and post-revitalization economic activities. Budgetary resources and facilities are considered adequate, but human resources for market management and supervision remain limited. The implementing organizations have clear authority, yet policy implementers lack firmness in enforcing trader discipline and managing post-revitalization conditions. Inter-agency communication and coordination have been conducted but have not functioned effectively and sustainably. Furthermore, although political support from the government is relatively strong, the social and economic conditions of traders have not fully supported the success of revitalization. These findings highlight the importance of strengthening non-physical aspects in the implementation of market revitalization policies.

Keywords: Revitalization, Policy Implementation, Traditional Market

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DI
KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI
KASUS PASAR PASIR GINTUNG)**

Nama Mahasiswa : **M Naufal Alfarisi**

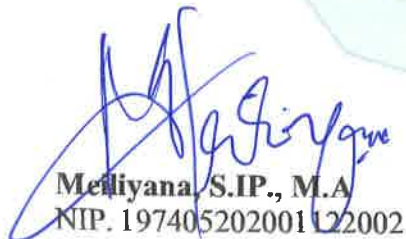
Nomor Pokok Mahasiswa : **2116041069**

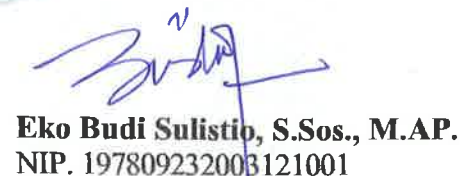
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

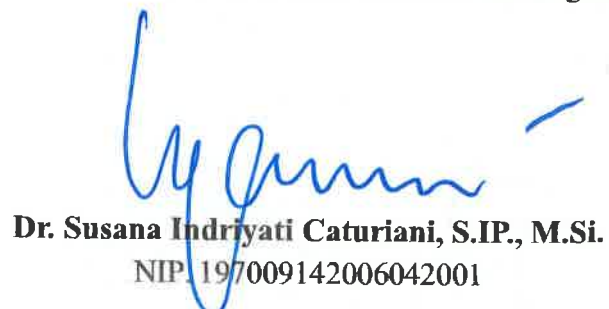


1. Komisi Pembimbing


Meliyana, S.IP., M.A
NIP. 197405202001122002


Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.
NIP. 197809232003121001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.
NIP. 197009142006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Meiliyana, S.IP., M.A**



Sekretaris : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



Penguji : **Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.**

.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Januari 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 3 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,



M Naufal Alfarisi
NPM. 2116041069

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M Naufal Alfarisi yang lahir di Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 15 Agustus 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Putra dari Bapak Daswirman dan Ibu Vil Khairat. Penulis memulai pendidikannya di Taman Kanak – Kanak (TK) Aisiyah 2 di Kota Bandar Lampung. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 4 Sukajawa Kota Bandar Lampung. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Fitrah Insani Bandar Lampung. Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Al Azhar Bandar Lampung, kemudian melanjutkan Studi Strata 1 (S1) melalui jalur seleksi bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis ikut aktif mengikuti berbagai organisasi internal kampus. Penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara sebagai anggota bidang Sumber Daya Organisasi. Penulis juga aktif pada unit kegiatan mahasiswa Forum Studi Pembangunan Islam dari tahun 2021 hingga 2022.

MOTTO

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim).

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”

(QS. Ibrahim: 14)

Berusahalah demi diri sendiri, karena hanya diri sendiri yang tahu sebesar apa usahamu”

(2521)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

(Tan Malaka)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Dengan izin-Nya penulis diberikan kemudahan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur. Tanpa pertolongan dan ridho-Nya pencapaian ini tentu tidak akan terwujud. Dengan tulus dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Daswirman dan Ibu Vil Khairat. Segala pencapaian ini tidak lepas dari doa, pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan mereka yang tidak pernah putus dalam menemani penulis selama menjalani proses penelitian. Terima kasih atas kesabaran, penguatan, dan segala bentuk dukungan moral maupun materiil yang telah menjadi sumber kekuatan saat penulis hampir putus asa. Penulis sangat bersyukur dan berterima kasih karena dianugerahi sosok orang tua yang tangguh, penuh cinta, dan ketulusan yang senantiasa mendampingi penulis hingga tercapainya mimpi menjadi sarjana Ilmu Administrasi Negara. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan bapak dan ibu dengan pahala yang berlipat ganda serta senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amiin.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, rezeki, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pasar Pasir Gintung)”** dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau. Penulis menyadari bahwa selama menjalani masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, berbagai tantangan dan kendala telah dihadapi. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak, segala hambatan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Meilliyana, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing utama. Terimakasih atas segala ilmu, doa, bimbingan, perhatian, saran, dan masukan yang telah ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang begitu besar, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi jenjang sarjana ini dengan baik. Ibu telah menjadi panutan yang menginspirasi, dan setiap hal yang Ibu berikan akan selalu penulis kenang sebagai bagian penting dari perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan untuk Ibu dan keluarga dalam setiap langkah ke depan.
2. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP. selaku dosen pembimbing kedua. Terimakasih atas segala ilmu, doa, bimbingan, saran, dan masukan yang telah bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang begitu besar, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi jenjang sarjana ini dengan baik. Bapak telah menjadi panutan yang menginspirasi, dan setiap hal yang bapak berikan akan selalu penulis kenang

sebagai bagian penting dari perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan untuk bapak dan keluarga dalam setiap langkah ke depan.

3. Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.SI. selaku dosen penguji. terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof Bambang selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan arahan, kritik, dan masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Segala bimbingan, koreksi, dan saran yang Prof Bambang berikan bukan hanya memperkaya kualitas penelitian ini, tetapi juga menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan akademik. Semoga ilmu, dedikasi, dan ketulusan yang Prof Bambang curahkan menjadi amal jariyah yang senantiasa mengalir pahalanya, serta mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
4. Bapak Apandi, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik (PA). Terima kasih atas segala bimbingan, ilmu, saran, dan masukan yang telah Bapak berikan yang sangat membantu penulis dalam menjalani proses pendidikan hingga tahap akhir. Semoga bapak senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan, serta terus menjadi sosok yang menginspirasi bagi seluruh mahasiswa.
5. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. dan Ibu Dr. Ani Agus Puspawati S.AP., M.AP. penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas segala kemudahan dan dukungan yang diberikan selama proses pengurusan persyaratan penelitian hingga terselesaikannya penelitian ini. Semoga Ibu beserta keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, serta diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalankan setiap amanah dan tugas ke depannya.
6. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu, dedikasi, dan ketulusan dalam membimbing selama penulis menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Ilmu

Administrasi Negara. Semoga seluruh ilmu yang telah diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menjalani kehidupan di masa depan. Semoga pula segala ilmu dan pengabdian yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

7. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi, mulai dari awal hingga akhir. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Mbak Wulan dan Mbak Uki yang dengan sabar dan sigap telah membantu dalam pengurusan berkas-berkas administrasi selama masa perkuliahan. Terima kasih atas arahan dan dukungan yang sangat berarti. Semoga staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kemudahan dalam setiap urusan, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Terkhusus saya haturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada orangtua tercinta saya, Bapak Daswirman dan Ibu Vil Khairat, atas segala pengorbanan dan usaha tanpa henti yang telah diberikan. Terima kasih atas kehadiran dan pendampingan dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih atas segala kasih sayang yang selalu kalian berikan, serta semua pelajaran, motivasi, dan pengalaman berharga yang menjadi bekal hidupku. Terima kasih sudah selalu menemani, mendukung segala usaha dan impian yang aku jalani, serta senantiasa mengawali dan menyertai dengan doa yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi tempat aku mencurahkan segala keluh kesah selama pengerjaan skripsi ini, serta menjadi penopang utama ketika aku hampir merasa putus asa dalam menjalani penelitian. Terima kasih telah mempercayai bahwa aku mampu membanggakan Bapak dan Ibu, meski aku belum selalu memenuhi harapan. Terima kasih atas kesabaran dalam mendidik dan membimbingku hingga aku berhasil menempuh jenjang sarjana. Doa-doa kalian yang tulus di setiap sujud selalu menjadi kekuatan bagiku. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan rezeki dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT, serta diberikan kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang, agar kelak dapat menyaksikan aku sukses

dalam kehidupan dunia dan akhirat sebagai putra yang berbakti kepada kedua orangtuaku. Terima kasih, Bapak dan Ibu.

9. saya persembahkan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Mbak dan Adek tercinta. Terima kasih untuk setiap perhatian yang tak pernah surut, untuk setiap nasihat yang menenangkan di saat hati gelisah, dan untuk doa yang selalu dipanjatkan. Mbak adalah sosok yang bisa mengayomi dan mengajarkan arti pengorbanan, sedangkan Adek adalah pengingat bahwa kebahagiaan bisa lahir dari hal-hal sederhana. Kalian berdua adalah bagian terindah dari perjalanan ini. Setiap langkah yang saya tapaki, setiap tantangan yang saya hadapi, semuanya terasa lebih ringan karena dukungan kalian. Semoga Allah membalas semua kebaikan, cinta, dan pengorbanan kalian dengan limpahan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
10. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara. Terima kasih atas informasi, masukan, saran, serta arahan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dukungan dan kesediaan Bapak dan Ibu untuk berbagi pengetahuan telah sangat mempermudah saya dalam memperoleh data yang diperlukan. Semoga segala kebaikan dan kontribusi yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.
11. Teruntuk Dila, Elfani, dan Nisa yang selalu ada dari awal sampai akhir, terima kasih sudah jadi bagian dari cerita panjang ini. Kita sudah sama-sama melewati masa-masa penuh tawa, lelah, stres, bahkan drama yang entah berapa kali bikin kita hampir menyerah. Tapi nyatanya, kita tetap jalan bareng, saling dorong, dan saling jaga. Kalian bukan cuma teman kuliah tetapi kalian sudah jadi keluarga yang nggak terikat darah tapi terikat rasa. Dari begadang ngerjain tugas, makan bareng di warung langganan, sampai saling curhat di berbagai momen, semua itu bikin perjalanan ini jauh lebih berwarna. Semoga nanti, meskipun kita punya jalan masing-masing, kita tetap punya satu titik temu untuk ketawa lagi bareng seperti dulu. Terima kasih sudah jadi rumah di tengah ributnya dunia perkuliahan.
12. Teruntuk sahabatku Amel dan Agung, makasih banget udah selalu sabar sama segala kerepotan yang aku bawa. Mulai dari minta tolong hal kecil sampai yang bikin pusing, kamu selalu siap bantu tanpa banyak tanya. Entah udah berapa kali

aku ganggu waktu kamu, tapi kamu tetap ada, tetap mau dengerin, dan tetap mau nolongin. Kamu nggak cuma sahabat, tapi udah kayak “penyelamat” di tengah ribetnya kuliah dan drama kehidupan. Semoga semua kebaikan dan kesabaran kamu dibalas berkali-kali lipat sama Allah. Dan semoga kita tetap bisa saling repotin, tapi dalam artian yang bikin kita sama-sama ketawa.

13. Teruntuk Ruweisha, There, dan Pinka , dan Wulan. terimakasih atas segala dukungan, kebersamaan, dan semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran serta bantuan yang tulus dari kalian telah menjadi motivasi berharga dalam melewati setiap tantangan. Semoga persahabatan dan kebersamaan yang terjalin dapat terus terjaga dengan baik di masa yang akan datang.
14. Teruntuk Aca, Aristi, Deajeng terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama proses penulisan skripsi. Terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita, canda, dan tawa yang menguatkan di tengah perjalanan ini. Semoga setiap langkah kalian senantiasa dimudahkan, diberikan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan, dan meraih kesuksesan di masa depan.
15. Teruntuk Group Basechamp Ican, Ari, Dhika, Duta, Alghi, Dwi, Bima, Pachri, Fido, Fajar, Fahrul, Figo, Afif, Doni, dan Alm Gilang. Dalam grup ini, saya menemukan arti kebersamaan yang sesungguhnya, sebuah ikatan yang terjalin dari awal perkuliahan hingga saat ini. Setiap perbincangan yang terjalin, baik serius maupun penuh canda, menjadi pengikat rasa yang sulit digantikan. Dukungan yang diberikan di saat sulit, semangat yang diberikan, dan tawa yang terjadi di sela-sela rutinitas, semuanya menjadi bukti bahwa persaudaraan ini lahir dari hati yang tulus. Tak dapat dipungkiri, perjalanan kita bersama telah menghadirkan banyak kenangan berharga. Semoga kebersamaan ini tidak hanya bertahan selama perkuliahan saja, tetapi juga terus mengakar kuat dalam kehidupan nyata, di setiap pertemuan yang kita jalani di masa depan.
16. Kepada seluruh teman-teman Gilgamara (2021) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan dan perjuangan selama masa perkuliahan. Bersama kalian, saya melewati berbagai dinamika dunia kampus yang penuh warna. Terima kasih atas setiap pengalaman berharga yang telah kita lalui bersama. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dalam versi diri

yang lebih baik, dan semoga Allah SWT senantiasa memudahkan setiap urusan kita kedepannya.

17. Teruntuk Jiho, sang leader yang penuh semangat dan ceria, terima kasih telah menjadi cahaya yang tak pernah redup bagi TWICE dan para ONCE di seluruh dunia. Suara indahmu, senyummu yang mempesona, dan energi yang selalu kamu berikan di setiap panggung adalah hadiah berharga yang menghibur dan menguatkan banyak hati, termasuk hati saya.
18. Terakhir, kepada diriku sendiri. Teruntuk diriku sendiri, Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun jalan sering terasa berat, dan tetap mencoba tersenyum walau hati kadang lelah. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu pilih, telah membawamu sampai di titik ini dan itu adalah pencapaian yang patut dibanggakan. Kamu sudah melewati banyak hal yang dulu kamu pikir tidak akan sanggup, dan itu membuktikan bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Tetaplah percaya bahwa hal-hal baik akan datang di waktu yang tepat. Teruslah berproses, teruslah menjadi versi terbaik dari apa yang kamu miliki.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Kebijakan Publik	8
2.2.1 Pengertian Kebijakan	8
2.2.2 Proses Kebijakan Publik.....	10
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	13
2.3.1 Pengertian Implementasi kebijakan Publik	13
2.3.2 Model Implementasi Kebijakan	14
2.4 Tinjauan Tentang Pasar	20
2.4.1 Pengertian Pasar	20
2.4.2 Fungsi Pasar	22
2.5 Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional.....	23
2.6 Kerangka Pikir Penelitian.....	26
III. METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Tipe Penelitian.....	28
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Lokasi Penelitian	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.3 Teknik Analisis Data	32
3.4 Teknik Keabsahan Data	33

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
4.1.1 Profil Pasar Pasir Gintung	37
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	37
4.1.3 Visi Misi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	40
4.2 Hasil Penelitian.....	41
4.2.1 Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung	41
4.3 Pembahasan Penelitian	59
4.3.1 Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung	59
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung	3
2. Fokus Utama Penelitian	29
3. Daftar Informan Yang Terlibat Dalam Penelitian	30
4. Matriks Hasil Penelitian	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Proses Pembuatan Kebijakan Publik Menurut William and Dunn.....	11
Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian	27
Gambar 3. Dokumentasi Sebelum dan Sesudah Revitalisasi Pasar Pasir Gintung	37
Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	38
Gambar 5. Kondisi Lantai 2 Pasar Pasir Gintung.....	43
Gambar 6. Kondisi Tempat Parkir Pasar Pasir Gintung.....	44
Gambar 7. Rapat Teknis Dan Koodinasi Revitalisasi Pasar Pasir Gintung	53

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemunculan pasar modern memberikan pengaruh yang besar terhadap keberadaan pasar tradisional yang juga berdampak pada perubahan minat masyarakat dalam berbelanja. Selain itu, adanya stigma bahwa pasar tradisional merupakan tempat yang kumuh dan kotor turut menyebabkan penurunan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional (Sari & Sandiasa, 2020). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 4 bahwa pasar rakyat/tradisional merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dengan tahapan jual beli dan tawar menawar (Ariani & Sihombing, 2023).

Pasar tradisional memiliki peran yang sangat penting dalam struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Pada beberapa negara seperti Indonesia, pasar tradisional bukan hanya sekadar tempat bertransaksi, tetapi juga merupakan pusat interaksi sosial dan budaya. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya pasar modern, banyak pasar tradisional yang mengalami penurunan jumlah pengunjung dan daya saing. Menurut Sultan (2019), pasar tradisional cenderung lebih menyukai proses terkendali yang masih sepenuhnya manual, minim perlengkapan, dan hanya melibatkan pedagang kelas menengah ke bawah. Sedangkan pasar modern terdiri dari pedagang dan konsumen kelas menengah atas, dan harga barang di pasar modern ditentukan berdasarkan label atau harga yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, revitalisasi pasar tradisional menjadi suatu keharusan untuk menjaga keberlangsungan dan relevansinya dalam konteks perekonomian lokal.

Kebijakan revitalisasi pasar tradisional bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik dan non-fisik pasar, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Selain itu revitalisasi ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pedagang (Poti & Mahadiansar, 2020). Pada konteks ini, revitalisasi tidak hanya mencakup renovasi bangunan dan fasilitas, tetapi juga mencakup pengembangan sistem manajemen, pelatihan bagi pedagang, dan peningkatan aksesibilitas (Setiawan, 2023). Aspek non-fisik dalam kebijakan revitalisasi pasar mencakup berbagai hal yang tidak berkaitan langsung dengan bangunan dan infrastruktur fisik, seperti pengelolaan pasar, manajemen, ekonomi, dan sosial. Aspek ini penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan revitalisasi pasar, bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga untuk jangka panjang. Dengan demikian, pasar tradisional dapat bertransformasi menjadi pasar semi modern yang lebih menarik bagi pengunjung tanpa menghilangkan karakteristik tradisional yang menjadi daya tarik utamanya.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 18 Tahun 2010 tentang pedoman revitalisasi kawasan menjelaskan bahwa revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan. Adapun tujuan dari adanya revitalisasi, yaitu sebagai berikut: 1) Mengubah struktur pasar tradisional menjadi lebih terstruktur, bersih, dan nyaman; 2) Memperkuat perlindungan terhadap konsumen dan pedagang; 3) Meningkatkan kesadaran penjual dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan higienitas produk; 4) Menyadarkan semua pihak yang berkepentingan bahwa keamanan dan mutu produk sangatlah penting; dan 5) Menjaga dan memperkuat daya saing pasar tradisional.

Dengan demikian, dampak yang diharapkan dari adanya revitalisasi pasar tradisional ialah meningkatkan minat pembeli untuk berbelanja di pasar tradisional dan meningkatkan daya saing terhadap pasar modern. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang memiliki banyak pasar tradisional. Menurut data Dinas Perdagangan Kota Bandar

Lampung pada tahun 2024, terdapat 19 pasar tradisional yang berada di Kota Bandar Lampung dan salah satunya adalah Pasar Pasir Gintung. Berikut merupakan daftar pasar tradisional di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1. Daftar Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung

No	Nama Pasar	Lokasi
1	Pasar Ambon	Teluk Betung Barat
2	Pasar Bambu Kuning	Tanjung Karang Pusat
3	Pasar Baru Suluh Mandiri	Panjang
4	Pasar Bawah	Enggal
5	Pasar Belek	Bumi Waras
6	Pasar Cimeng	Teluk Betung Selatan
7	Pasar Gudang Lelang	Bumi waras
8	Pasar Kangkung	Teluk Betung Selatan
9	Pasar Korem Gatam	Kedaton
10	Pasar Korpri	Sukarame
11	Pasar Kota Karang	Teluk Betung Barat
12	Pasar Panjang	Panjang
13	Pasar Way Kandis	Tanjung Senang
14	Pasar Way Halim	Way Halim
15	Pasar Tugu	Kedamaian
16	Pasar Tani	Kemiling
17	Pasar Tamin	Tanjung Karang Barat
18	Pasar Smep	Tanjung Karang Barat
19	Pasar Pasir Gintung	Tanjung Karang Barat

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 2024

Pasar Pasir Gintung didirikan pada tahun 1989, pada awalnya sebagai pasar tempel dan kemudian bertransformasi menjadi pasar tradisional. Pasar ini terletak di Jalan Pisang, Kelurahan Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan dokumen Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Pasar Pasir Gintung memiliki luas lahan sekitar 2,201 m² dan menyediakan 313 unit tempat berdagang. Pasar ini dikenal sebagai pusat penjualan berbagai barang, termasuk produk pertanian, sembako, dan alat rumah tangga. Pasar ini menjadi tempat yang ramai untuk produk sayuran segar yang diambil dari berbagai daerah, menjadikannya sebagai pasar induk yang menggantikan pasar induk sebelumnya, yaitu Pasar Tamin.

Pasar Pasir Gintung dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Sejak tahun 2008, pasar ini berada di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan pasar. Pasar ini memainkan peran penting dalam perekonomian lokal yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitar.

Implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional memerlukan dukungan antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat. Partisipasi aktif dari semua pihak sangat penting untuk memastikan bahwa proses revitalisasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat. Adapun regulasi mengenai revitalisasi pasar tradisional diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2007). Kebijakan revitalisasi ini diharapkan dapat mengembalikan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pedagang yang bergantung pada pasar sebagai sumber penghidupan. Salah satu hal yang sering muncul adalah bahwa revitalisasi pasar tradisional hanyalah perbaikan fisik. Namun, masalah manajemen pasar harus dipertimbangkan karena revitalisasi mengubah lebih dari sekedar struktur pasar (Engkus, 2020). Salah satu faktor yang melatarbelakangi revitalisasi Pasar Pasir Gintung adalah adanya kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Kota Bandar Lampung, yang menjadikan pasar tersebut sebagai salah satu lokasi yang mendapat perhatian pemerintah pusat. Perhatian pemerintah pusat tersebut berimplikasi pada meningkatnya dukungan kebijakan, koordinasi antarinstansi, serta alokasi sumber daya untuk merevitalisasi Pasar Pasir Gintung. Dengan demikian, revitalisasi pasar ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Pasir Gintung berjalan sampai selesai, namun berdasarkan hasil pra-riset terdapat permasalahan saat revitalisasi pasar itu berlangsung, yakni proses sterilisasi para pedagang dari Pasar Pasir Gintung. Setelah revitalisasi Pasar Pasir Gintung selesai para pedagang yang sebelumnya direlokasi dapat menempati kembali tempat mereka di Pasar Pasir Gintung. Penempatan tersebut berdasarkan pengundian yang telah dilakukan sebelumnya.

Setelah beberapa minggu menempati pasar tersebut, permasalahan lain yang saat ini timbul ialah para pedagang yang memilih berjualan di luar pasar walaupun telah disediakan tempat bagi para pedagang untuk berjualan. Selain itu, terdapat beberapa fasilitas yang tidak digunakan dengan semestinya seperti lahan parkir yang digunakan untuk berjualan. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah maupun instansi terkait dengan adanya permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tentang **“Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung Studi Kasus Pasar Pasir Gintung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi pasar pasir gintung dilakukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan suatu target atau sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisa bagaimana implementasi kebijakan dilakukan pada revitalisasi pasar pasir gintung

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam segi teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam kajian kebijakan publik khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi terhadap Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Pasir Gintung dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal bagi pedagang Pasar Pasir Gintung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jumanah dkk (2019) yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Sampay Kabupaten Lebak)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa evaluasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional studi kasus di Pasar Sampay Kabupaten Lebak sudah berhasil dan memiliki dampak sosial. hal ini dapat dilihat dari aspek responsivitas yaitu, masyarakat merespon dengan baik keberadaan pasar ini. Berdasarkan aspek dampak sosial, yaitu mengubah perilaku berbelanja dari kebiasaan berbelanja di pasar modern menjadi belanja di pasar tradisional.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Engkus (2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung”. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Kebijakan Publik menurut Merilee S Grindle. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi tersebut belum sesuai dengan peraturan yang ada. Kebijakan revitalisasi yang dilakukan di Pasar Sarijadi cenderung menekankan aspek fisik, yaitu pembangunan gedung pasar sedangkan aspek-aspek non-fisik yang menekankan manajemen, ekonomi dan sosial budaya belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan isi kebijakan terdapat permasalahan pada indikator tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, dan pelaksana program. Dalam dimensi konteks implementasi terdapat permasalahan pada

karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, yaitu belum optimalnya kinerja pengurus Pasar Sarijadi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanto (2023) yang berjudul “Implementasi Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini menyatakan pelaksanaan implementasi revitalisasi pasar tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di Pasar Tugu Bandar Lampung menghasilkan dampak negatif. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait di Pasar Tugu merupakan langkah yang tepat, tetapi dalam pengelolaan manajemen pasar tidak ada sehingga pelaksanaan revitalisasi yang telah dilakukan dianggap kurang tepat.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Poti & Mahadiansar (2020) yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Studi Pasar Akau Potong Lembu Kota Tanjung Pinang”. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Dunn 2018 dengan metode Studi Kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menyatakan bahwa evaluasi kebijakan program revitalisasi Pasar Potong Lembu Kota Tanjung Pinang belum terdapat nilai analisis dampak silang dan diskonting terhadap program tersebut sehingga revitalisasi pasar tradisional hanya bersifat pemetaan sasaran, klarifikasi nilai, serta pemetaan hambatan yang telah menjadi dampak kebijakan revitalisasi Pasar Potong Lembu Kota Tanjung Pinang.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Setiawan (2023) yang berjudul Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Rakyat Tani Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung). Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Nakamura dan Smallwod. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa program revitalisasi di Pasar Tani belum efektif karena belum dapat memenuhi kelima indikator efektivitas program. Faktor penghambat efektivitas program revitalisasi di Pasar Tani yaitu kurangnya upaya pengelola pasar dalam menciptakan lingkungan

perdagangan yang sesuai dengan petunjuk teknis perdagangan serta kurangnya upaya pembinaan disiplin kepada para pedagang yang ada.

Kesimpulan utama dari penelitian di atas mengenai implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kondisi pasar, hasil yang dicapai masih jauh dari harapan. Tantangan utama dalam implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Indonesia meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya perhatian terhadap aspek non-fisik, dan pengelolaan yang tidak efektif. Penelitian ini penting dilakukan karena masih terjadi ketidaktepatan implementasi pasca revitalisasi, khususnya terkait ketegasan pelaksana dan ketertiban pedagang. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan lokasi penelitian. Lokasi penelitian akan dilakukan di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dan teori yang digunakan ialah Teori Van Meter Van Horn.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik. Konsep dasar kebijakan publik mencakup pemahaman bahwa kebijakan tidak hanya sekadar keputusan administratif tetapi juga alat untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam situasi seperti ini, kebijakan publik berfungsi sebagai penyebaran sumber daya dan nilai untuk mencapai kesejahteraan umum masyarakat. Secara etimologis istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “*Polis*” yang mempunyai makna negara yang kemudian masuk menjadi ke dalam bahasa latin “*politia*” yang berarti negara. setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa inggris “*Policie*” yang memiliki arti berkaitan dengan suatu pengendalian permasalahan publik atau administrasi pemerintah (Nur & Guntur, 2019)

Menurut Carl Fried Rich, kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu yang memberikan hambatan hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau sasaran. Kebijakan dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya mengurangi permasalahan publik yang merupakan masalah masalah kolektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk ke dalam agenda pemerintah (Wahab, 2012).

Kebijakan adalah arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi permasalahan. Pemerintah melakukan tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran demi kepentingan umum, mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu untuk kebutuhan masyarakat dan dibuat secara bertahap (Raviansyah dkk, 2022). Hal tersebut merupakan tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum. Langkah-langkah ini biasanya dilaksanakan secara bertahap yang menunjukkan bahwa pembuat kebijakan perlu merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah secara sistematis daripada melakukannya seluruhnya. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang berarti kebijakan harus diarahkan pada kepentingan publik.

Menurut Anderson dalam Winarno (2007) kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Menurut Tomas R. Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani suatu persoalan atau permasalahan tertentu.

Kebijakan tidak lepas dari peran publik, dalam hal tujuan publik atau bagian masyarakat. Kebijakan publik memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum berdasarkan aspek subjek, objek, dan lingkungan. Kebijakan pemerintah tentang apa yang harus dilakukan atau tidak adalah salah satu aspek masalah. Karena kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang resmi

dan kuat, ada sisi paksaan untuk melaksanakan dan mematuhi (Raviansyah dkk, 2022).

Kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk pengambilan keputusan dari tingkat atas hingga tingkat bawah organisasi. Presiden menetapkan kebijakan umum, dan menteri bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Kebijakan publik tidak hanya berfokus pada pelayanan dasar, tetapi juga berusaha untuk menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut karena pemerintah berusaha untuk mengimbangi kebutuhan individu dan kepentingan kolektif saat membuat kebijakan. Kebijakan publik memainkan peran penting dalam membentuk struktur dan dinamika sosial suatu masyarakat. Tujuan kebijakan publik adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat, meskipun dampak kebijakan publik mungkin bervariasi tergantung pada konteks dan penerapan kebijakan tersebut (Nurlatipah dkk, 2024).

2.2.2 Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak hanya muncul begitu saja melainkan melalui serangkaian proses yang panjang. Anderson, menggambarkan lima langkah proses kebijakan dalam Prabawati dkk (2020), yaitu *agenda setting*, *policy formulation*, *policy adoption*, *policy implementation*, dan *policy assessment* atau *evaluation*. Menurut Ripley dalam Prabawati dkk (2020) proses kebijakan dibedakan menjadi empat tahapan, yaitu *agenda setting*, *Formulation and legitimating of goal and programs*, *program implementation*, *performance, and impact*, dan *decision about the future of the policy and program*.

Menurut Dye (1992), proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut:

1. Identifikasi Masalah Kebijakan

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

2. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda, juga dikenal sebagai "*agenda setting*", adalah aktivitas yang memfokuskan perhatian pejabat publik dan media masa pada keputusan apa yang akan dibuat mengenai masalah publik tertentu.

3. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan adalah tahapan di mana usulan kebijakan dimulai dan disusun melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, eksekutif, dan lembaga legislatif.

4. Pengesahan Kebijakan

Pengesahan kebijakan dilakukan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan atau intervensi, presiden, dan kongres.

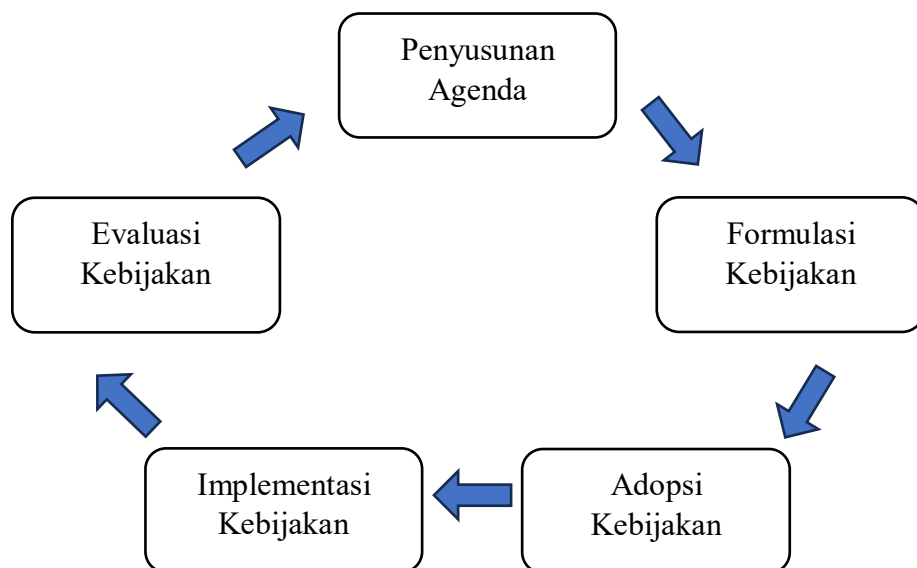
5. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

6. Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Menurut Dunn (1999), proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Berikut ini merupakan gambar dari proses pembuatan kebijakan menurut William and Dunn.



Gambar 1. Proses Pembuatan Kebijakan Publik Menurut William and Dunn
 Sumber: Dunn (1999)

Dengan melihat pemaparan di atas maka sebetulnya ada tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan proses kebijakan publik, hal ini diungkapkan oleh Nugroho dalam Maulana (2019), yakni: perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan dan dengan penambahan revisi kebijakan, yaitu merumuskan kembali dari kebijakan sebelumnya. Salah satu faktor yang melatarbelakangi revitalisasi Pasar Pasir Gantung adalah adanya kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Kota Bandar Lampung, yang menjadikan pasar tersebut sebagai salah satu lokasi yang mendapat perhatian pemerintah pusat. Perhatian pemerintah pusat tersebut berimplikasi pada meningkatnya dukungan kebijakan, koordinasi antarinstansi, serta alokasi sumber daya untuk merevitalisasi Pasar Pasir Gantung. Dengan demikian, revitalisasi pasar ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun demikian, revitalisasi Pasar Pasir Gantung akibat momentum kunjungan Presiden juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih sangat bergantung pada faktor eksternal dan dorongan politik tertentu. Hal ini menjadi penting untuk dicermati, karena keberlanjutan revitalisasi pasar seharusnya tidak hanya bergantung pada momentum kunjungan pejabat negara, tetapi perlu diikuti dengan penguatan aspek non-fisik, manajemen pasar, dan pengawasan pasca-revitalisasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah sering kali lebih peka terhadap instruksi dan arah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dibandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya di tingkat lokal. Hal ini terlihat dari penentuan prioritas kebijakan yang sering kali dipengaruhi oleh situasi politik tertentu atau arahan dari pusat, seperti kehadiran pejabat negara tingkat tinggi, sedangkan pasar atau sektor lain yang secara objektif lebih membutuhkan peningkatan kualitas belum mendapat perhatian yang sama. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses dalam merancang agenda kebijakan masih didominasi oleh pengaruh hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, bukan sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan dan masalah yang ada di lapangan.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Implementasi kebijakan Publik

Salah satu bagian penting dari proses kebijakan adalah implementasi kebijakan; ini adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan dibuat. Tanpa implementasi, kebijakan yang telah dibuat akan menjadi tidak bermakna. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan memiliki peran penting dalam kebijakan publik (Igrisa, 2022). Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan publik harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan publik yang efektif memerlukan pertimbangan cermat terhadap berbagai aspek untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, penerapan kebijakan publik merupakan upaya untuk melaksanakan keputusan atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (Tachjan, 2006).

Implementasi dipandang secara luas memiliki arti sebagai pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program yang telah ditetapkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007) implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan memberikan sebuah otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle dalam Winarno (2007) memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan implementasi adalah membentuk sebuah kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Van Meter & Van Horn dalam Winarno (2007) mengartikan implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi kebijakan

berarti memahami apa yang terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dibuat, yang mencakup upaya untuk mengatur dan mempengaruhi masyarakat secara nyata (Mazmanian & Sabatier, 1980). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari sebuah keputusan yang telah ditetapkan agar menghasilkan perubahan sesuai dengan tujuan yang diinginkan

Implementasi kebijakan mencakup banyak kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Kedua, badan - badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan arahan konkret serta rencana dan desain suatu program. Ketiga, badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, termasuk komunikasi yang efektif antara para pelaksana, ketersediaan sumber daya, dan standar dan tujuan yang jelas. Kebijakan yang baik sekalipun dapat gagal dalam pelaksanaannya dan tidak memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat jika tidak memperhatikan aspek-aspek ini.

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan

Model kebijakan atau yang biasa disebut (*Policy Models*) merupakan representasi sederhana mengenai aspek aspek yang terpilih dari suatu masalah yang disusun untuk tujuan tertentu (Dunn,1999). Model kebijakan sendiri merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan membantu mengurangi kompleksitas dan dapat dikelola oleh para analis kebijakan. Model kebijakan dapat membedakan sesuatu hal yang bersifat esensial dan tidak esensial dari situasi masalah, mempertegas hubungan antara variabel variabel penting, dan membantu menjelaskan dari pilihan pilihan kebijakan (Dunn,1999).

Model kebijakan adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami, merancang, dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Wahab dalam Abdoellah & Rusfiana (2016) model merupakan penyajian baik secara abstrak maupun operasional, tetapi penggunaanya diperlukan untuk

keperluan analisis atau penelitian yang baik buruknya suatu model akan sangat tergantung pada kompleksitas masalah kebijakan yang dikaji dan tujuan dari analisis itu sendiri. Semakin kompleks permasalahan kebijakan maka diperlukan teori atau model yang relatif operasional, yakni model yang dapat menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis.

Model implementasi kebijakan dibagi menjadi dua, yaitu model implementasi kebijakan *Top Down* dan model implementasi kebijakan *Bottom Up*. Model Implementasi *Top Down* dan *Bottom Up* adalah dua pendekatan yang digunakan untuk memahami implementasi kebijakan. Keduanya bermula pada asumsi yang sama, sejauh mana tindakan implementor sesuai dengan tujuan dan prosedur yang ditentukan.

1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn

Model implementasi kebijakan pertama ialah model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn yang disebut sebagai *A Model of The Policy Implementation* merupakan model yang paling klasik. Van Meter Van Horn dalam Dewi (2019) model implementasi kebijakan ini memperlihatkan enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan kinerja, yaitu Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Badan Pelaksana, Sikap Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, dan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan adalah komponen yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan. Tujuan dan indikator keberhasilan kebijakan harus jelas sehingga pelaksana kebijakan tidak memiliki interpretasi yang berbeda dari pembuat kebijakan. Jika tidak, kegagalan pelaksanaan kebijakan dapat terjadi.

2. Sumber Daya

Indikator-indikator yang menunjukkan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Sumber daya termasuk dana, materi, sumber daya manusia, dan berbagai insentif yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan dilaksanakan. Mereka yang berhasil melakukan tugas atau mereka yang gagal melakukannya dapat menerima insentif ataupun punishment.

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan model implementasi kebijakan ini adalah karakteristik badan yang melaksanakan kebijakan.

4. Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan adalah faktor pendukung yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi kebijakan. Setiap komponen model di atas akan ditentukan melalui persepsi para pelaksana kebijakan.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Dalam indikator komunikasi antar organisasi sangat memperhatikan koordinasi antar organisasi untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-sumber informasi dengan memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan. Berjalan baik atau tidaknya komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Salah satu faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi sosial mengacu pada aspek kehidupan sosial budaya yang berkembang di lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan. Secara ekonomi, kemampuan masyarakat dan pedagang untuk beradaptasi terhadap perubahan akibat kebijakan bergantung pada tingkat kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Secara politik, adanya dukungan pemerintah memberikan legitimasi serta memperlancar implementasi kebijakan. Meskipun suatu kebijakan dirancang dengan sangat baik, jika lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tidak kondusif, maka implementasinya berpotensi menghadapi hambatan yang serius.

2. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model yang dikembangkan oleh George C. Edwards III (1980). Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III menunjuk empat dimensi yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi dalam Dewi (2019), yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator (*policy maker*) kepada komunikan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam indikator antara lain transmisi, kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

2. Sumber Daya (*Resources*)

yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Peralatan (sarana dan prasarana), Sumber Daya Informasi, dan Kewenangan. Sumber sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang memiliki keterampilan yang memadai serta dengan jumlah yang cukup, kewenangan, informasi, dan fasilitas.

3. Disposisi (*Dispositions*)

merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.

3. Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model kebijakan keempat dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) bahwa implementasi merupakan upaya untuk melakukan keputusan kebijakan. Terdapat tiga variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yakni karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan atau undang-undang, dan variabel lingkungan. Mazmanian Sabatier mengkategorikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel lingkungan. Berikut tiga kategori variabel dimaksud, yaitu:

1. Variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan yang dikehendaki.

2. Variabel *intervening* yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.
3. Variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

4. Model Implementasi Kebijakan Marille S. Grindle

Model implementasi yang dikemukakan oleh Grindle, terdapat dua variabel dalam keberhasilan implementasi yaitu variabel isi kebijakan dan variabel konteks kebijakan. Variabel isi kebijakan berkaitan mengenai apa yang dijelaskan dalam kebijakan tersebut. Variabel konteks kebijakan berkaitan mengenai bagaimana kebijakan yang dikeluarkan dapat berpengaruh terhadap proses administrasi dan politik. Dalam model implementasi kebijakan, Grindle menamakan modelnya "*Implementation as a Political and Administratif Process*". Adapun variabel isi kebijakan (*content of policy*) terdiri dari:

1. Kepentingan kelompok sasaran (*interest affected*)

Suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada kepentingan kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. Dalam hal ini, apakah kebijakan tersebut mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Suatu kebijakan dapat berhasil apabila mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai kelompok sasaran.

2. Manfaat yang diterima (*type of benefits*)

Keberhasilan suatu kebijakan akan memberikan manfaat terhadap kelompok sasarannya dan kebijakan tersebut akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya.

3. Perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*)

Suatu kebijakan yang menginginkan perubahan yang besar, maka semakin sulit dalam implementasinya. Dalam hal ini, perubahan yang besar yang merupakan tujuan dari suatu kebijakan akan terdapat kesulitan dalam mencapai tujuannya.

4. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*)

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan diimplementasikan sangat bergantung pada tempat pengambilan keputusan. Semakin jauh lokasi pengambilan keputusan, maka semakin besar kemungkinan implementasi kebijakan tidak berhasil dan begitu pula sebaliknya.

5. Pelaksana program (*program implementor*)

Salah satu yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah para pelaksananya. Implementor yang memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat tentunya dapat mendukung kebijakan tersebut berhasil.

6. Sumber daya (*resources committed*)

Ketersediaan sumber daya pendukung implementasi kebijakan sangat berpengaruh pada keberhasilan kebijakan tersebut. kekurangan sumber-sumber daya pendukung akan menyulitkan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam konteks variabel, terdapat tiga indikator, yaitu:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor (*power, interest, and strategies of actor involved*)

Keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut mempunyai kekuatan, kepentingan, dan strategi-strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*)

Keberhasilan kebijakan akan ditentukan pula oleh dukungan institusi dan rezim yang berkuasa. Dukungan ini bervariasi tergantung dari karakteristik rezim berkuasa.

3. Kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiveness*)

Kebijakan akan berhasil apabila ada kesesuaian tujuan dan bentuk program. Hal yang sama pula apabila para implementor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan.

2.4 Tinjauan Tentang Pasar

2.4.1 Pengertian Pasar

Pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni sebagai tempat di mana orang melakukan jual beli barang dan jasa. Definisi ini mencakup interaksi antara penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang dan pembeli yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang.

William J. Stanton dalam Setiawan (2023), menggambarkan pasar sebagai sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang dipergunakan untuk berbelanja, dan keinginan untuk membelanjakan uang tersebut. Philip Kotler mendefinisikan pasar sebagai tempat di mana setiap pelanggan potensial memiliki persamaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga mereka bersedia melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa mendefinisikan pasar sebagai tempat di mana barang dan jasa dijual dan dibeli oleh pihak swasta, pemerintah daerah, atau pemerintah pusat. Peraturan ini menekankan pentingnya pengelolaan pasar desa untuk mendorong perekonomian lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasar harus mengatur sistem transaksi yang biasanya melibatkan tawar-menawar antara penjual dan pembeli serta menyediakan fasilitas yang memadai bagi pedagang dan konsumen.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan tempat berlangsungnya penjual dan pembeli melakukan transaksi uang maupun barang. Pasar dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu pasar tradisional dan pasar modern. adapun pengertian pasar tradisional dan pasar modern sebagai berikut:

- 1) Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Dalam Perpres ini, pasar tradisional didefinisikan sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan BUMD.
- 2) Pasar Tradisional dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2007 adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
- 3) Menurut Paulus Tambunan dalam Hidayati dkk., (2022) Pasar tradisional adalah tempat pedagang dan pembeli bertransaksi, di mana harga komoditi seperti barang kebutuhan sehari-hari, hasil pertanian, dan hasil laut diperjualbelikan.
- 4) Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, istilah "pasar tradisional" diubah menjadi "pasar rakyat". Pasar rakyat adalah tempat di mana pembeli dan penjual bertemu, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui proses tawar-menawar untuk membeli berbagai jenis barang konsumsi.
- 5) Menurut Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2007 Pasar Modern adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
- 6) Pasar modern memiliki karakteristik modern, sehingga terdapat berbagai macam barang yang dijual dengan harga yang masuk akal dan dengan layanan sendiri. Plaza, mal, dan tempat lainnya adalah tempat pasar modern berlangsung. Pasar modern tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional. Namun, di pasar modern, penjual dan konsumen tidak perlu bertransaksi secara langsung, pembeli hanya perlu melihat label harga yang tercantum pada barang atau *barcode*.

2.4.2 Fungsi Pasar

Menurut Fuad (2000) Pasar memiliki fungsi sebagai berikut: Pertama, pembentukan nilai harga pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu, saling menawar, dan akhirnya mencapai kesepakatan tentang harga. Harga atau nilai ini adalah hasil dari proses jual beli yang dilakukan di pasar. Kedua, pendistribusian pasar yang memudahkan produsen untuk mendistribusikan produk mereka secara langsung ke pembeli. Selama pasar berfungsi dengan baik, distribusi produk dari produsen ke pembeli akan berjalan lancar. Ketiga, ialah promosi hal ini karena pasar selalu dipenuhi dengan orang-orang yang tidak diundang, promosi pasar adalah tempat terbaik bagi produsen untuk memperkenalkan produk mereka kepada konsumen. Menurut Geminastiti dan Nurlita dalam Setiawan (2023) menjelaskan bahwa pasar memiliki beberapa fungsi yang diantaranya meliputi:

1. Distribusi

Pasar memungkinkan produsen untuk berinteraksi dengan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memberikan barang atau jasa mereka kepada konsumen. Dengan demikian, pasar berfungsi sebagai media untuk menyalurkan atau memperlancarkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen.

2. Penentu Harga

Harga ditetapkan melalui perhitungan dan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam kesepakatan ini, penjual mempertimbangkan laba yang diinginkannya, sedangkan pembeli mempertimbangkan manfaat barang atau jasa serta keadaan keuangan barang atau jasa.

3. Sarana Promosi

Pasar berfungsi sebagai sarana promosi, di mana produsen memperkenalkan dan menginformasikan barang atau jasa kepada konsumen dengan manfaat, keunggulan, dan khasannya. Promosi dilakukan dengan tujuan membuat pelanggan atau pembeli tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan, seperti dengan memasang spanduk atau banner, atau memberi brosur kepada pelanggan, dan sebagainya.

4. Penyerap Tenaga Kerja

Fungsi pasar sebagai penyerap tenaga kerja berarti bahwa pasar memiliki pedagang dan pembeli serta jasa seperti parkir dan pikul, yang memungkinkan orang yang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan.

2.5 Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional

Upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali suatu wilayah atau bagian kota yang telah kehilangan vitalitasnya dan mengalami degradasi dikenal sebagai revitalisasi (Safari, 2020). Revitalisasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Proses ini tidak hanya mengaktifkan kembali komponen yang ada, tetapi juga memperbaiki dan menyempurnakan struktur dan mekanisme kerja agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi baru. Oleh karena itu, revitalisasi adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan vitalitas suatu area atau program, sehingga dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Menurut Gouillart dan Kelly dalam Yuliana & Suryawan (2016) mendefinisikan revitalisasi adalah upaya mendorong pertumbuhan dengan mengaitkan organisasi kepada lingkungannya. Menurut Ashby dalam Yuliana & Suryawan (2016) revitalisasi adalah mencakup perubahan yang dilaksanakan secara *quantum leap* yaitu lompatan besar yang tidak hanya mencakup perubahan bertahap, melainkan langsung menuju sasaran yang jauh berbeda dengan kondisi awal (Suryawan, 2016). Revitalisasi merupakan upaya untuk menghidupkan kembali wilayah yang mengalami penurunan fungsi dan kualitas melalui perbaikan fisik, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan interaksi sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Danisworo dalam Firdausyah & Dewi (2021) mendefinisikan revitalisasi sebagai upaya untuk menghidupkan kembali area yang sudah mati dan meningkatkan vitalitasnya dengan menambahkan bangunan dan aktivitas baru. Menurut Menteri Pekerjaan Umum (2010) revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan. Hal ini bertujuan untuk menemukan kembali potensi yang pernah dimiliki oleh kawasan tersebut dan

meningkatkan kualitas lingkungan kota. Program revitalisasi pasar tradisional muncul sebagai jawaban atas citra negatif yang melekat pada pasar tradisional (Engkus, 2020). Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/MDAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 1 ayat 10 tertuliskan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.

Revitalisasi secara fisik merupakan upaya perbaikan kualitas infrastruktur suatu kawasan agar mampu berfungsi lebih optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Revitalisasi ini biasanya mencakup pembangunan ulang struktur, perbaikan fasilitas sanitasi, sistem drainase, serta penyediaan ruang sirkulasi yang lebih luas untuk mendukung mobilitas pedagang maupun pengunjung. Selain itu, revitalisasi secara fisik dapat digambarkan seperti modernisasi sarana pendukung seperti pencahayaan, ventilasi, area parkir, tempat pembuangan sampah, dan fasilitas lainnya. Secara prinsip, revitalisasi fisik tidak hanya berfokus pada memperindah tampilan bangunan, tetapi juga memastikan bahwa tata ruang yang baru dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban aktivitas fisik pasar. Revitalisasi fisik juga diharapkan mendorong pedagang untuk berjualan di tempat yang telah disediakan serta menarik lebih banyak pembeli, sehingga aktivitas ekonomi lokal dapat meningkat. Akan tetapi, keberhasilan revitalisasi fisik sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan setelah pembangunan selesai, termasuk kesiapan pedagang, pengelola pasar, dan pelaksana kebijakan untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan secara optimal.

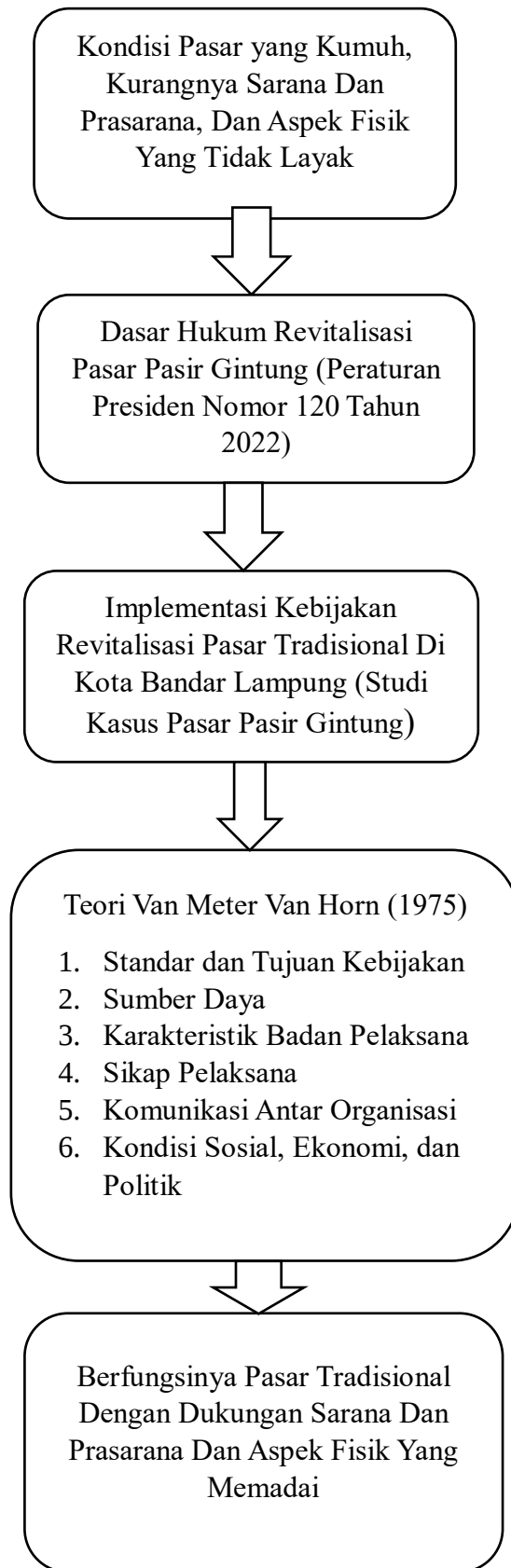
Revitalisasi Pasar Pasir Gantung di Kota Bandar Lampung telah berhasil meningkatkan kondisi fisik pasar, tetapi keberhasilan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan aspek non-fisik. Dalam penerapannya, tata kelola pasar setelah revitalisasi masih belum berjalan dengan optimal, terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian kegiatan para pedagang. Hal ini dapat dilihat masih terdapat pedagang yang menjual barang di luar area pasar serta penggunaan fasilitas pasar yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Situasi ini

menunjukkan bahwa peningkatan aspek non-fisik, khususnya penguatan sistem pengelolaan dan ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan, masih menjadi tantangan utama di Pasar Pasir Gintung. Selain itu, penataan dan pembinaan pedagang di Pasar Pasir Gintung belum dilakukan secara berkelanjutan. Meskipun kios dan los telah disediakan, sebagian pedagang belum sepenuhnya patuh terhadap penempatan yang telah ditetapkan dan belum mengalami perubahan perilaku yang signifikan pasca-revitalisasi. Oleh karena itu, revitalisasi non-fisik di Pasar Pasir Gintung perlu diarahkan pada penguatan manajemen pasar, pembinaan pedagang, ketegasan penegakan aturan, serta peningkatan komunikasi dan partisipasi seluruh aktor pasar agar hasil revitalisasi fisik dapat berfungsi secara berkelanjutan.

Revitalisasi Pasar Pasir Gintung tidak hanya diwujudkan melalui perbaikan fisik bangunan, tetapi juga melalui penyediaan dan pemanfaatan teknologi serta alat pendukung pasar sebagai bagian dari modernisasi pasar tradisional. Keberadaan teknologi dan alat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, kebersihan, serta efektivitas pengelolaan pasar agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan karakter pasar tradisional. Secara fisik, Pasar Pasir Gintung telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan alat pendukung, seperti sistem pencahayaan dan ventilasi yang lebih baik, instalasi sanitasi yang memadai, tempat pembuangan sampah terpusat, serta fasilitas keamanan seperti hydrant dan jalur evakuasi. Berdasarkan uraian di atas, revitalisasi pasar tradisional adalah proses pembangunan ulang struktur utama pasar yang sudah tidak layak untuk meningkatkan aset fisik pasar dan mengoptimalkan kembali fungsi-fungsinya untuk mendukung produktivitas dan kelangsungan hidup masyarakat yang ada di dalamnya.

2.6 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian merupakan sebuah gambaran dari konsep yang akan menjelaskan mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian dan menjadi acuan bagi peneliti untuk membuat batasan terhadap proses penelitian agar dapat memfokuskan aspek masalah yang akan diteliti. Dasar pemikiran yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merujuk pada Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional mengidentifikasinya melalui teori Van Meter & Van Horn. Berikut merupakan kerangka pikir penelitian:



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan wawasan yang tidak dapat diperoleh melalui metode statistik atau alat kuantitatif lainnya (Murdiyanto, 2020). Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Pasir Gintung untuk meningkatkan perekonomian di wilayah sekitar dan menata pasar agar lebih nyaman dan bersih sehingga dapat menarik minat pembeli untuk berbelanja di pasar tradisional. Untuk mengetahui hal tersebut penulis membutuhkan narasumber untuk dilakukan wawancara mendalam dan juga dokumen untuk mendapatkan data-data yang valid dan sesuai.

Creswell dalam Murdiyanto (2020) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian dan pemahaman berbasis metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam pendekatan ini, peneliti memberikan gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, melaporkan pendapat responden secara rinci, dan melakukan penelitian dalam situasi yang alami. Dengan demikian, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman berbagai persoalan kehidupan sosial berdasarkan situasi dunia nyata dan lingkungan alam yang holistik, kompleks, dan terperinci. Untuk mendapatkan hasil yang baik, peneliti harus mendapatkan data dan fakta tentang fenomena tersebut dari berbagai sumber. kemudian menelaahnya untuk mendapatkan kesimpulan yang lengkap yang berhubungan dengan implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Kota Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan dan menganalisis wawancara-wawancara yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan masalah yang diteliti untuk mengarahkan penulis agar tidak terjebak dengan banyaknya data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif. Fokus pada penelitian ini yaitu menganalisis Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan kerangka pikir dan judul penelitian yang telah penulis gambarkan sebelumnya, penelitian ini mempunyai fokus Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan teori Van Meter Van Horn yang meliputi:

No	Indikator	Sub Indikator
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	1. Apakah kebijakan revitalisasi pasar tersebut memang dibutuhkan dan apa tujuannya? 2. Bagaimana isi kebijakan tersebut direalisasikan di lapangan? Apakah sudah dilaksanakan atau belum
2	Sumber Daya	1. Siapa saja implementor yang terlibat dalam revitalisasi pasar gantung 2. Apa peran masing masing dari implementor tersebut 3. Anggaran pembangunan pasar dan operasional
3	Karakteristik Badan Pelaksana	Bagaimana hubungan antar lembaga yang terlibat dalam revitalisasi pasar pasir gantung
4	Sikap Pelaksanaan	Bagaimana sikap dan komitmen pelaksana selama implementasi berlangsung
5	Komunikasi Antar Organisasi	1. Bagaimana Koordinasi antara pihak satu dengan yang lainnya 2. informasi mengenai kebijakan disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat
6	Kondisi Sosial, Ekonomi, Dan Politik	1. Sejauh mana kondisi sosial, ekonomi, dan politik mempengaruhi proses implementasi kebijakan 2. Bagaimana respon atau partisipasi masyarakat terhadap kebijakan

Tabel 2. Fokus Utama Penelitian

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2025

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Lokasi dan subjek penelitian dipilih untuk menjadi sumber

informasi yang mengungkap dan menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung yang bertempat di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Pasar Pasir Gintung, Satpol PP Kota Bandar Lampung, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Lampung. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena pasar pasir gintung menjadi pasar yang telah dilaksanakan program revitalisasi pasar dan revitalisasi pasar tersebut dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung akan tetapi terdapat sebuah permasalahan dalam proses implementasi kebijakannya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini terdapat tiga macam metode dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono, 2020) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dan pedagang Pasar Pasir Gintung.

Tabel 3. Daftar Informan Yang Terlibat Dalam Penelitian

No	Nama	Informan	Informasi
1	Ardiansyah Makki, S.STP., M.H.	Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	Sebagai informan pengetahuan pelaksanaan revitalisasi pasar pasir gintung mulai dari awal pengerjaan hingga revitalisasi pasar selesai. Bagaimana Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Pasir Gintung, Siapa saja yang telibat, Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam kebijakan, koordinasi pelaksana, sumber daya manusia, anggaran, Peran birokrat dalam

				implementasi kebijakan dan tanggung jawab pelaksana.
2	Irenne Meisuzanti S.Sos., M.M.	Staff Pengelolaan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	Bidang Pasar	Data mengenai bagaimana pendataan para pedagang, relokasi pedagang, dan penempatan para pedagang serta pengelolaan Pasar Pasir Gintung setelah direvitalisasi.
3	Ibu Endang Ibu Parti Ibu Fatimah Bapak Ateng	Pedagang Sayuran Pedagang Buah Pedagang Sembako Pedagang Tahu		Adapun informasi yang ingin diperoleh ialah mengenai perubahan yang dirasakan, manfaat yang diterima, dan peningkatan penjualan para pedagang Pasar Pasir Gintung.
4	Jan Roma SE. MM	Kepala Ketertiban dan Ketentraman Satpol PP Kota Bandar Lampung	Bidang Umum	Proses relokasi pedagang dan penjagaan ketertiban umum.
5	Pendi Maita Yunas S.T.	Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis lampung		informan mempunyai pengetahuan terkait pelaksanaan kebijakan revitalisasi Pasar Pasir Gintung mulai dari awal pengerjaan hingga revitalisasi pasar selesai
6	Ibu Vil Ibu Felyani	Pembeli Pembeli		Perubahan yang dirasakan pembeli dalam berbelanja di Pasar Pasir Gintung.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2025

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa dalam bentuk gambar, tulisan, atau karya karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Gottschalk dalam (Murdiyanto, 2020) menyatakan bahwa dokumen dalam pengertiannya merupakan setiap proses pembuktian

yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan lisan, gambaran, ataupun yang lainnya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang bersumber pada Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang penugasan khusus dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2021 yang berkaitan dengan Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2021, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung Tahun 2024, dan Dokumen Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

3. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi faktual secara langsung di lapangan. Melalui proses pengamatan yang sistematis terhadap aktivitas, kondisi, serta interaksi yang terjadi di lingkungan penelitian, peneliti berusaha menangkap kejadian secara objektif sesuai dengan fokus kajian yang telah ditetapkan. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti, dan mencatat secara sistematis hal-hal yang diamati (Sugiyono, 2020). Observasi ini dilakukan di Pasar Pasir Gintung Sebagai objek penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah standar dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen telah diimplementasikan dan sesuai dengan realita di lapangan

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam macam dan dilakukan secara terus menerus. (Sugiyono, 2020) menjelaskan analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) teknik analisis data tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang bersifat pokok, memfokuskan terhadap hal-hal yang dianggap penting,

dan dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Selain itu, hal ini akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan tambahan dan pencarian data jika diperlukan (Sugiyono, 2020). Dalam tahapan ini peneliti memilah mana data yang dibutuhkan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung. Peneliti akan memisahkan data yang diperlukan dan memfokuskan data yang benar benar berhubungan Dengan Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung.

2. Tampilan Data (*Data Display*)

Menyajikan sekumpulan informasi yang disusun dengan cara yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan dikenal sebagai penyajian data. Teks naratif, matriks, grafik jaringan, dan bagan adalah beberapa bentuk penyajiannya (Murdiyanto, 2020). Dengan menampilkan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Sugiyono, 2020). Diharapkan bahwa dengan memverifikasi makna setiap data yang diperoleh melalui satu atau lebih metode, akan diperoleh informasi yang akan membantu mencapai tujuan penelitian. Kesimpulan akhir dari penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung.

3.4 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh. Menurut Murdiyanto (2020) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility, transferbility, dependability, dan confirmability*.

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kriteria ini menggunakan metode seperti pemeriksaan, ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan dengan pihak yang terlibat, memperbanyak referensi, dan juga menganalisis kasus yang tidak masuk akal. sebagai analogi apapun kegiatan yang dilakukan untuk hasil penelitian tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga dapat dipercaya antara lain:

1) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti kembali ke lapangan dan melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data untuk menemukan masalah baru. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan sangat bergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, perpanjangan pengamatan harus difokuskan pada menguji apakah data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar, tidak berubah, atau tidak. Jika data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar, maka perpanjangan pengamatan ini akan dilakukan selama waktu yang diperlukan untuk memastikan bahwa data tersebut benar. Perpanjangan pengamatan dilakukan setelah dilakukan wawancara dengan narasumber pada tanggal 26 Juni 2025.

2) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan perhatian secara mendalam terhadap aspek-aspek penting yang berhubungan dengan implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Pasir Gintung. Peneliti tidak hanya melakukan pengamatan secara umum,

tetapi juga memusatkan perhatian pada indikator-indikator yang telah ditentukan dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

3) Triangulasi

Wiersma dalam Sugiyono (2020) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim penelitian lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data (Murdiyanto, 2020). Untuk melakukan pengecekan derajat kepercayaan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber, yang berarti membandingkan hasil data yang diperoleh melalui berbagai alat dan waktu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai sumber.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Validitas eksternal yang berkaitan dengan tingkat kesepakatan atau penerapan hasil penelitian ke populasi yang diambil sampel disebut *transferability*. Peneliti harus memberikan penjelasan mendalam tentang temuan penelitian agar orang lain dapat memahaminya dan dapat menerapkannya. Hasil yang jelas, terorganisir, dan dapat diandalkan, membuat pembaca menjadi percaya tentang hasil penelitian sehingga dapat membuat keputusan apakah dapat atau tidak untuk menggunakan temuan penelitian di tempat lain.

3. Uji Kebergantungan (*Dependability*)

pengujian kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi penulis tidak melakukan proses penelitian tapi dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada, maka

penelitian itu tidak reliabel atau dependable. Untuk itu pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Setiap wawancara dicatat tanggal, waktu, lokasi, serta identitas narasumber yang relevan dengan tetap menjaga kerahasiaan. Selain itu, peneliti menyimpan rekaman audio wawancara dan catatan lapangan yang terstruktur.. selain itu, dokumentasi juga memudahkan peneliti untuk menelusuri kembali langkah-langkah yang telah dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian atau perlu dilakukan verifikasi ulang terhadap data.

4. Konfirmasi (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar. Untuk itu, setiap kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh bukti empiris seperti kutipan langsung dari wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi foto kondisi fisik pasar setelah revitalisasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Pasir Gantung di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan revitalisasi secara umum telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan kebijakan secara menyeluruh seperti banyaknya pedagang yang berjualan di luar area pasar dan sikap pelaksana yang tidak tegas. Revitalisasi yang dilakukan terbukti mampu memperbaiki kondisi fisik pasar, seperti bangunan, fasilitas, dan sarana pendukung, sehingga pasar menjadi lebih bersih dan tertata dibandingkan sebelum revitalisasi. Namun demikian, keberhasilan tersebut masih lebih dominan pada aspek fisik dan belum diikuti dengan penguatan aspek non-fisik secara maksimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Pasir Gantung memerlukan penguatan pada aspek non-fisik, terutama dalam hal manajemen pasar, ketegasan pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta pembinaan pedagang agar tujuan revitalisasi dapat tercapai secara berkelanjutan. Terdapat beberapa tantangan pada beberapa indikator yang menunjukkan belum sepenuhnya berjalan optimal sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan revitalisasi Pasar Pasir Gantung telah dirumuskan dengan jelas, mengacu pada kebijakan nasional seperti Perpres No. 120 Tahun 2022 tentang penugasan khusus dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan SNI 8152:2021. Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencapai sasaran, karena masih terdapat pedagang yang enggan menempati area dalam pasar, khususnya lantai dua, dan adanya fungsi ruang seperti area parkir yang menyimpang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara rancangan kebijakan dengan realitas sosial dan operasional di lapangan.

2. Sumber Daya

Kebijakan revitalisasi didukung oleh anggaran yang memadai dan fasilitas fisik yang telah sesuai dengan standar. Namun, keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM) di tingkat daerah menjadi kendala utama, terutama dalam mengoperasikan fasilitas modern. Ketidakterlibatan Dinas Perdagangan sejak awal juga menyebabkan kurangnya kesiapan teknis dan kelembagaan dalam pengelolaan pasar pasca-revitalisasi.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Secara struktural, Dinas Perdagangan memiliki pembagian tugas yang jelas, namun perannya dalam revitalisasi sangat terbatas karena dominasi pemerintah pusat. Dinas Perdagangan hanya berfungsi sebagai penerima hasil pembangunan tanpa keterlibatan dalam proses teknis. Meskipun demikian, mereka tetap menunjukkan peran aktif dalam pengelolaan sosial dan operasional pasar setelah revitalisasi selesai.

4. Sikap Pelaksana

Pelaksana, khususnya Dinas Perdagangan menunjukkan sikap proaktif dan komunikatif pada tahap awal dengan melakukan musyawarah bersama pemangku kepentingan. Namun, komitmen tersebut tidak berjalan konsisten, terutama pada tahap pasca-pembangunan, karena kurangnya komunikasi lanjutan yang berdampak pada ketidaksiapan pedagang dalam beradaptasi dengan kondisi pasar yang baru.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi pelaksana, terutama antara pemerintah pusat (Kementerian PUPR) dan pemerintah daerah, berjalan secara formal dan rutin melalui rapat koordinasi. Namun, komunikasi horizontal antar OPD dan dengan pedagang masih lemah, karena tidak dilakukan sosialisasi lanjutan selama pembangunan berlangsung. Hal ini menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada pihak penerima kebijakan.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dari sisi sosial, revitalisasi pasar diterima dengan baik karena memberikan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Namun, dari sisi ekonomi,

pedagang mengalami penurunan pendapatan akibat sepi pengunjung di lantai atas dan persaingan dengan pedagang di luar gedung pasar. Secara politik, dukungan pemerintah pusat kuat, tetapi keterlibatan daerah dalam keputusan strategis sangat terbatas, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak responsif terhadap situasi ataupun kebiasaan masyarakat pasar

Implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Pasir Gintung di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan telah dirancang dengan standar dan tujuan yang jelas sesuai regulasi nasional, serta didukung dengan anggaran dan fasilitas teknis dari pemerintah pusat. Meskipun revitalisasi Pasar Pasir Gintung telah memenuhi standar dan didukung secara teknis dalam pengimplementasiannya belum berjalan optimal dikarenakan terbatasnya Sumber daya Manusia (SDM) dalam pemanfaatan alat operasional, minimnya peran Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Pasir Gintung, dan lemahnya komunikasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan dengan para pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan regulatif dan infrastruktur, tetapi juga oleh sinergi antar pelaksana serta partisipasi aktif masyarakat sebagai penerima manfaat. Tanpa keterlibatan menyeluruh dari semua pihak, implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Pasir Gintung hanya menjadi proyek fisik yang tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi pedagang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Pasir Gintung. Oleh karena itu, saran-saran berikut disusun sebagai bentuk kontribusi peneliti dalam memberikan masukan untuk perbaikan implementasi kebijakan di masa mendatang.

1. Bagi Pemerintah Pusat, pelibatan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan teknis sangat penting agar revitalisasi lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan tidak hanya berorientasi pada standar fisik nasional.

2. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung perlu memberikan keringanan seperti diskon retribusi, fasilitas angkut barang gratis, atau penyediaan alat bantu pengangkut yang dapat meringankan beban pedagang dalam meningkatkan motivasi mereka untuk tetap bertahan di lantai dua.
3. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung diharapkan menerapkan kontrol dan pengawasan terhadap penertiban pedagang secara berkelanjutan termasuk dengan menindaklanjuti pedagang yang masih berjualan di luar pasar. Penempatan semua pedagang di dalam pasar akan menciptakan keadilan dan meningkatkan aktivitas ekonomi dalam gedung pasar. Komunikasi dan ketegasan menjadi solusi hal tersebut.
4. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung harus mempersiapkan tenaga ahli untuk mengelola fasilitas modern yang telah dibangun (seperti genset, hydrant, mesin air). Pelatihan teknis dan rekrutmen SDM terampil sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan operasional pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah & Rusfiana. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik..* Alfabeta. Bandung
- Alhudha, O. (2020). Revitalisasi Pasar Tradisional dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang di Kota Padang Panjang Oktriyandi. *Jurnal Perspektif*, 3(4), 666–676.
- Ariani & Sihombing. (2023). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sei Sikambing Kota Medan. *Jurnal Niara*, 16(2), 363–378. <https://doi.org/10.31849/Niara.V16i2.16261>
- Cairney, P. (2012). *Understanding Public Policy*. Macmillan Education UK. <https://doi.org/10.1007/978-0-230-35699-3>
- Dewi, D. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jakarta Press. Jakarta
- Engkus, E. (2020). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 6(1), 9–16. <https://doi.org/10.30997/Jgs.V6i1.2388>
- Firdausyiah, A. G., & Dewi, S. P. (2021). Pengaruh Revitalisasi Terhadap Pola Ruang Kota Lama Semarang. *Jurnal Riptek*, 15(1), 17–27. <https://doi.org/10.35475/Riptek.V15i1.104>
- Fitriyanto, F. (2023). Implementasi Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar tradisional Tugu Bandar Lampung). *International Journal of Technology*, 47(1), 100950.
- Fuad, dkk (2000). *Pengantar Bisnis*. Retrieved October 6, 2024, From <https://books.google.co.id/books?id=Evfwj7nbd-Kc&printsec=frontcover&dq=pengantar+bisnis&hl=id&sa=X&ved=2ahukewjatu3crq3rahwr9xmbhfxya3eq6aewaxoecaiqag#v=onepage&q=pengantar+bisnis&f=false>
- Ginting, Dkk. (2023). Implementasi Program Revitalisasi Pasar Berdasarkan Sni 8152 : 2021 Pasar Rakyat Di Pasar Johar Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 12(2), 526–546.
- Hidayati, dkk. (2022). Strategi Bertahan Hidup Pedagang Pasar Tradisional Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Pada Pedagang Kecil Di Pasar Koga, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 24(1), 39–56. <https://doi.org/10.23960/Sosiologi.V24i1.234>

- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Tanah Air Beta. Yogyakarta.
- Jumanah, dkk. (2019). Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (studi Kasus Pasar Sampay Kabupaten Lebak). *Jurnal Administrasi Negara*. 7(2), 122-128.
- Maulana D & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik)*. CV AA Rizky. Banten
- Mazmanian & Sabatier. (1980). The Implementation Of Public Policy: A Framework Of Analysis*. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560. <https://doi.org/10.1111/J.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Menteri Pekerjaan Umum. (2010). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 18/Prt/M/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan. *Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*, 1–47.
- Muktadir & Usman. (2023). Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Kondisi Ekonomi Pedagang Pasar Tani Kota Bandar Lampung. *Journal On Education*, 6(1), 6701–6711. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3898>
- Mulyati & Ani. (2021). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Oleh Pd. Pasar Bermartabat Kota Bandung. *Neo Politea*, 2(1), 46–63. <https://doi.org/10.53675/Neopolitea.v2i1.99>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*. http://www.academia.edu/download/35360663/Method_Penelitian_Kualitatif.docx
- Nur, A & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Makasar. Universitas Negeri Makasar.
- Nurlatipah, dkk. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten *Jak Publik (Jurnal ...)*, 5(11), 42–49. <http://administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/92%0ahttp://administrasiku.com/index.php/jakp/article/download/92/89>
- Pasciana, Dkk. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Di Uptd Pasar Cikajang Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 14(1), 23–43. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v14i1.130>
- Paselle. (2024). *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Pagi Samarinda)*. 4(2), 50–63.
- Poti, J., & Mahadiansar, M. (2020). Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional: Studi Pasar Akau Potong Lembu Kota Tanjungpinang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 294–309. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.4165>

- Prabawati, dkk (2020). Analisis Kebijakan Publik. Unesa University Press. Surabaya
- Raviansyah Dkk. (2022). Kebijakan Publik. Pt. Global Eksekutif Teknologi. Padang.
- Safari, M. A. (2020). Implementasi Revitalisasi Pasar Tradisional B Srikaton. *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik*, 4(1), 18–31. <https://doi.org/10.33369/Jgoap.V4i1.12464>
- Sari, Y., & Sandiasa, G. (2020). Widya Publika. *Jurnal Widya Publika*, 8(2), 176–192. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika/article/view/648>
- Setiawan, I. (2023). Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Studi Pada Pasar Rakyat Tani Kemiling Kota Bandar Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/view/creators/indra=3asetiawan=3a=3a.html>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sultan, A. (2019). Revitalisasi Pasar Tradisional Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 132–146. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jeb/article/view/2154>
- Suryawan, Y. &. (2016). Revitalisasi Daya Tarik Wisata Dalam Rangka Peningkatan Kunjungan Wisatawan (Studi Kasus: Daya Tarik Wisata Sangeh, Kabupaten Badung, Bali). *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(2), 53. <https://doi.org/10.24843/Jdepar.2016.V04.I02.P10>
- Tachjan. (2006). *Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Bandung.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. (F. Hutari, Ed.), *Hukum Perumahan* (p. 482). PT Bumi Aksara. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=t3zPqTnRjX0C&dq=wrong+diet+pills&source=gbs_navlinks_s
- William & Dunn. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi 2.)* Gadjah Mada University pers. Yogyakarta.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Media Press Indo. Yogyakarta.